

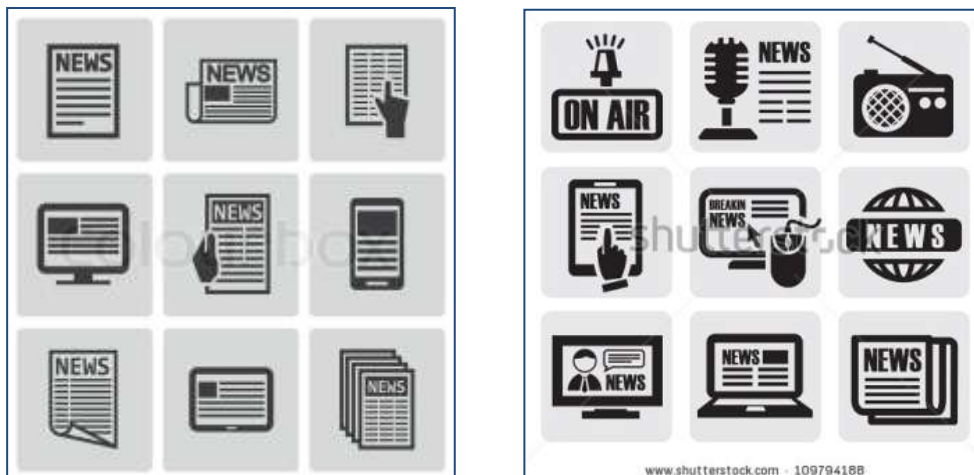


**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Newspaper Media Online**

Sarana & Prasarana

Rabu, 26 Juni 2017



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional  
Jakarta, Bappenas  
2017**

## **Daftar Isi**

1. PERCEPATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*Media Online Kompas*)
2. PORSI SWASTA BANGUN PRASARANA PERLU DIGENJOT (*Media Online Media Indonesia*)

# KOMPAS

Rabu

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

26 Juli 2017

## Percepat Pembangunan Berkelanjutan

### Realisasi Komitmen Pemerintah Ditunggu

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia diminta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal itu sebagai tindak lanjut komitmen pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai peraturan presiden itu harus meningkatkan kinerja pemerintah. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai sampai 2030. Itu dicanangkan negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 dan diikuti 189 negara (*Kompas*, Minggu, 27 September 2015).

"Selama ini persoalan utama bangsa adalah fungsi koordinasi dan sinergi antarkementerian. Perpres ini untuk mengingatkan

kementerian agar bekerja ekstra keras. Sebab, indeks performa kementerian kecil, sedangkan target besar," kata Penasihat Senior Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional untuk Pembangunan Indonesia (INFID) Michael Hoelman dalam temu media, diprakarsai Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs, di Jakarta, Selasa (25/7).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs terdiri dari INFID, Koalisi Perempuan Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia, Yayasan Kesehatan Perempuan, Migrant Care, dan Oxfam Inter-

national. Mereka mengapresiasi tindakan Joko Widodo menandatangani perpres itu. Apalagi, Dewan Pengarah dalam pencapaian SDGs diketuai Presiden.

#### Tiga tantangan

Ada tiga tantangan pemerintah mencapai SDGs, yakni politik, masalah data, dan aspek sosial. Pemerintah hanya memiliki waktu 2,5 tahun demi memastikan prioritas pembangunan di Indonesia dalam mencapai SDGs.

"Minggu ini Presiden mengkritik beberapa kementerian yang membuat peraturan tak mencerminkan arah pencapaian Presiden. Dengan ada perpres ini, kami berharap kerja kementerian lebih terarah," ujarnya.

Menurut laporan ketimpangan 2016 yang disusun INFID, indeks ketimpangan sosial di Indonesia 4,4 dari 10 ranah ketimpangan. Ada 7 dari 10 warga Indonesia menilai ada ketimpangan sosial

meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan akses fasilitas publik bagi warga, termasuk penyandang disabilitas.

Koordinator Program SDGs dan Universal Periodic Review dari Organisasi Harapan Nusantara (Ohana) Jonna Damanik menambahkan, dalam SDGs, pemerintah berkomitmen melayani semua lapisan masyarakat. Jadi, tak boleh ada yang tertinggal dalam pembangunan.

"Pemerintah harus mengidentifikasi siapa dan di mana mereka yang tertinggal untuk dilibatkan dalam proses pembangunan," kata Jonna. Paradigma inklusivitas dinilai sebatas omongan sehingga perundangan masih terjadi.

Dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah belum menimbang penyandang disabilitas. Dengan ada perpres itu, pemerintah perlu membawa perspektif hak asasi manusia, melibatkan kelompok tertinggal. (IDO)

**Pemerintah Indonesia diminta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal itu, sebagai tindak lanjut komitmen pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai hingga 2030. Itu dicanangkan Negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 dan diikuti 189 negara**

Hashtag Berita :

#Infrastruktur

#MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia

#SDGs

#PelaksanaanProgramNasional #KetahananPanganNasional



Rabu, 26 Juli 2017

# Porsi Swasta Bangun Prasarana Perlu Digenjot

*Banyaknya infrastruktur yang dikuasai BUMN membuat biaya infrastruktur tinggi karena nyaris tak ada kompetisi.*

**TESA OKTIANA SURBAKTI**  
[teso@mediaindonesia.com](mailto:teso@mediaindonesia.com)

**B**ANK Dunia menilai pemerintah Indonesia cenderung mengabaikan peran swasta dalam proses pembangunan infrastruktur. Hal itu terlihat dari pemberian porsi yang lebih besar bagi badan usaha milik negara (BUMN) untuk menggarap proyek prasarana berskala besar.

Kebijakan ini, menurut Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, bakal bermuara pada penurunan minat swasta untuk berinvestasi.

"BUMN dan swasta sebe-

narnya dapat berkerja sama. Skemanya bisa *joint venture* atau sekuritisasi. Agar kerja sama berhasil, toleransi kepada swasta harus ditingkatkan, begitu pula risiko perlu ditekan," ujar Kim, dalam acara seminar Indonesia Infrastructure Finance Forum, di Jakarta, kemarin.

Kim membeberkan ada sejumlah alasan yang mendasari perlunya swasta lebih dilibatkan. Antara lain yakni dengan banyaknya proyek infrastruktur yang dikuasai BUMN membuat biaya pembangunan infrastruktur tinggi karena nyaris tidak ada kompetisi. Bila swasta punya ke-

sempatan yang sama dengan BUMN, akan terjadi kompetisi antarperusahaan konstruksi. Pada akhirnya, akan menekan biaya pembangunan infrastruktur.

"Ketika terjadi kompetisi harga yang lebih terjangkau, efisiensi naik dan bisa mengurangi pinjaman," imbuh dia.

Selain itu, guna mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur yang belum merata di beberapa daerah, pemerintah diestimasikan membutuhkan US\$500 miliar atau Rp6.650 triliun untuk pembangunan infrastruktur hingga lima tahun ke depan.

Untuk itu, dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan dari APBN. Pasalnya, masih banyak kekurangan penerimaan negara dari sektor

pajak sehingga tidak mampu bergantung terlalu banyak dari APBN.

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini juga masih kurang dari 50% dari potensi yang ada. Sedangkan rasio pajak terhadap PDB turun dari 11,4% menjadi 10,4%.

"Pemungutan pajak belum optimal, belanja belum efisien, dan batasan defisit fiskal 3% dari PDB," sebut Kim.

Untuk itu, dibunahkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia lewat skema *public private partnership* (PPP).

## Peluang sama

Dalam merespons itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan sebenarnya pemerintah memberikan

ruang yang sama antara BUMN dan swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur.

"Presiden Jokowi berkali-kali bilang terhadap seluruh kegiatan ekonomi termasuk proyek pembangunan infrastruktur, BUMN maupun swasta harus memiliki peran yang sama," tegas Menkeu.

Dia menambahkan, tidak perlu ada pembagian spesifik terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dapat digarap swasta. Sepanjang proyek tersebut bukan 100% dikelola pemerintah, pada dasarnya swasta memiliki kesempatan untuk terlibat.

Sementara itu, pengamat BUMN Said Didu menilai, swasta enggan berinvestasi lantaran sikap pemerintah yang kerap inkonsisten. Dia mencontohkan proyek Blok Masela yang masih tarik ulur. "Coba, gimana investor gak takut. Contohnya, Blok Masela yang sudah dikontrak, tapi diubah (*plan of Development/PoD*). PT Freeport Indonesia (PTFI) juga ketentuannya berubah-ubah. Padahal mereka itu perusahaan besar semua." (E-4)

**Banyaknya infrastruktur yang dikuasai Badan Usaha Milik Negara membuat biaya infrastruktur tinggi karena nyaris tak ada kompetisi dan Bank Dunia menilai pemerintah Indonesia cenderung mengabaikan peran swasta dalam proses pembangunan infrastruktur. Hal itu terlihat dari pemberian porsi yang lebih besar bagi badan usaha milik negara (BUMN) untuk menggarap proyek prasarana berskala besar. Kebijakan ini, menurut Presiden Bank Dunia, bakal bermuara pada penurunan minat swasta untuk berinvestasi. Selain itu, BUMN dan swasta sebenarnya dapat berkerja sama dan skemanya bisa joint venture atau sekuritisasi. Agar kerja sama berhasil, toleransi kepada swasta harus ditingkatkan, begitu pula risiko perlu ditekan**

Hashtag Berita :

#BadanUsahaMilikNegara #Investasi PelaksanaanProyekNasional #SDGs #Infrastruktur #MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia #PelaksanaanProgramNasional